



**PERBEKEL DESA SIDAKARYA
KOTA DENPASAR**

PERATURAN DESA SIDAKARYA

NOMOR 12 TAHUN 2025

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA SIDAKARYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 5);
14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 73);
15. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2019 Nomor 06);
16. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) 2019-2025 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2020 Nomor 01) sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa Sidakarya Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sidakarya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) 2019-2027 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2025 Nomor 4).;
17. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2025 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Sidakarya Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sidakarya Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2025 Nomor 10);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDAKARYA

dan
PERBEKEL DESA SIDAKARYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 12.814.270.886,00
2. Belanja Desa	<u>Rp 17.714.280.439,48</u>
Surplus/Defisit	Rp (4.900.009.553,48)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 4.900.009.553,48
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp 4.900.009.553,48

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Perbekel dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sidakarya

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 31 Desember 2025

PEMEREL DESA SIDAKARYA,

I WAYAN MADRAYASA



Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 31 Desember 2025
SEKRETARIS DESA SIDAKARYA,


I WAYAN KARJANA



LEMBARAN DESA SIDAKARYA TAHUN 2025 NOMOR 12

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SIDA KARYA
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	2.160.200.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	10.614.070.886,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	40.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	12.814.270.886,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>7.397.518.192,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Sittap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	3.951.581.192,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	180.740.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	180.740.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1.308.220.216,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	1.308.220.216,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	93.994.776,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	93.994.776,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	689.762.000,00	DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	689.762.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	505.200.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	505.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	39.517.800,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.517.800,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Perbekel, Perangkat Desa dan BPD	129.600.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	129.600.000,00	
1.1.91		Penyediaan Penghasilan Staff Desa	671.696.400,00	ADD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	671.696.400,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Penghasilan Staff Desa	67.200.000,00	PAD
1.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.200.000,00	
1.1.93		Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa/Staff Desa	12.284.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.284.000,00	
1.1.94		Penyediaan Kegiatan Sosial Desa	39.250.000,00	PAD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.250.000,00	
1.1.96		Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Provinsi Bali	18.000.000,00	PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.96	5.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
1.1.97		Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dari BKK Provinsi Bali	70.800.000,00	PBP
1.1.97	5.1.	Belanja Pegawai	70.800.000,00	
1.1.98		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Ekosistem Desa (BPD dan Staf Desa)	125.316.000,00	PBH
1.1.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	125.316.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	435.650.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	197.650.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	197.650.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	93.000.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.000.000,00	
1.2.90		Perencanaan Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa	120.000.000,00	PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	120.000.000,00	
1.2.91		Penyediaan Aset Melalui Sewa Tanah/Gedung/Bangunan	25.000.000,00	PAD
1.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	52.070.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	525.000,00	PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	525.000,00	
1.3.90		Pendataan Administrasi Penduduk Non Permanen/Pendatang	26.800.000,00	ADD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.800.000,00	
1.3.92		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran SDGs Desa (Dipilih)	24.745.000,00	PBH
1.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.745.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	415.817.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	111.350.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	111.350.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	37.975.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.975.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.160.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.160.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	9.300.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.970.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.970.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	158.607.000,00	PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.070.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	144.537.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	93.455.000,00	PBH
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.455.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	2.542.400.000,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Anda Pertanahan)	50.000.000,00	ADD
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	2.492.400.000,00	PBH
1.5.99	5.3.	Belanja Modal	2.492.400.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>6.837.508.600,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	70.825.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	43.830.000,00	ADD
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.830.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	8.570.000,00	PAD
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.570.000,00	
2.1.90		Dukungan Pendidikan bagi sekolah Lansia dan Perempuan	18.425.000,00	DLL
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.425.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	1.176.825.600,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	168.700.000,00	PBH
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	168.700.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lansia, Insentif)	629.540.000,00	DDS, PBH
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	629.540.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	68.795.600,00	ADD, DDS, DLL, I
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.795.600,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	295.510.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	295.510.000,00	
2.2.93		Penyelenggaraan Rumah Desa Sehat/Tim Percepatan Penurunan Stunting	14.280.000,00	DDS
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.280.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	5.282.802.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	147.000.000,00	PBH
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	147.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	1.759.736.000,00	ADD, DLL, PBH
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	764.736.000,00	
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	995.000.000,00	
2.4.90		Penyediaan Sarana Prasarana dan Operasional Pengelolaan TPS3R	1.876.066.000,00	PAD
2.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.876.066.000,00	
2.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.500.000.000,00	PBH
2.4.99	5.3.	Belanja Modal	1.500.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	300.706.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	300.706.000,00	ADD, PBH
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.706.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.350.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	6.350.000,00	PAD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.350.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>3.300.564.511,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	330.492.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	254.800.000,00	PBH
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	254.800.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	31.945.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.945.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	17.980.000,00	ADD, PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.980.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	8.050.000,00	ADD
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.050.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	16.217.000,00	PAD
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.217.000,00	
3.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.500.000,00	PBH
3.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.152.089.011,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	118.155.000,00	ADD, PAD
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	118.155.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/Kot)	112.485.000,00	ADD, PAD, PBH
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	112.485.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	338.776.000,00	ADD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	338.776.000,00	
3.2.90		Pembinaan Adat dan Keagamaan (Upakara dan Upacara)	70.000.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
3.2.93		Penunjang Operasional Subak/Subak Abian (BKK Provinsi)	15.053.011,00	PBP
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.053.011,00	
3.2.94		Penunjang Operasional dan kegiatan Desa Adat (BKK Kota)	1.290.000.000,00	PBK
3.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.290.000.000,00	
3.2.95		Kegiatan Bhakti Penganyar	175.800.000,00	PBH
3.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	175.800.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	31.820.000,00	ADD
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.820.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	460.000.000,00	
3.3.90		Penunjang Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus untuk Sekeha Teruna	460.000.000,00	PBK

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	460.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	357.983.500,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	114.508.500,00	ADD, PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	114.508.500,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	243.475.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.975.000,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	175.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>156.343.900,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	45.195.000,00	
4.1.06		Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)	45.195.000,00	PBH
4.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.195.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	15.755.000,00	
4.3.90		Peningkatan Sinergisitas Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	14.045.000,00	ADD
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.045.000,00	
4.3.91		Pelatihan Peningkatan Kapasitas PKPKD, PPKD dan TPK	1.710.000,00	PBH
4.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.710.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	26.559.800,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	12.149.800,00	PBH
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.149.800,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	14.410.000,00	DLL
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.410.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	64.462.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	36.602.000,00	DLL, PBH
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.092.000,00	
4.5.01	5.3.	Belanja Modal	24.510.000,00	
4.5.90		Pelatihan Kewirausahaan dan Leadership	27.860.000,00	PBH
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.860.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4.372.100,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	4.372.100,00	PBH
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.372.100,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>22.345.236,48</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	22.345.236,48	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	22.345.236,48	ADD, DLL, PAD, F
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	22.345.236,48	
		JUMLAH BELANJA	17.714.280.439,48	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(4.900.009.553,48)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	4.900.009.553,48	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		PEMBIAYAAN NETTC	4.900.009.553,48	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

DENPASAR, 31 Desember 2025

PERBEKEL
SIDIKARYA

LWAYAN MADRAYASA,SH

